



Efek PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi terhadap Pengangguran di Kabupaten Bone

The Effect of Gross Regional Domestic Product, Government Spending and Inflation on Unemployment in Bone Regency.

Aulia Rahman Bato^{1*}, Firdayanti Ahmad²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

*email: aulia.rahman@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Pengangguran merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi suatu wilayah. Riset ini bertujuan untuk menganalisis dampak PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pengangguran di Kabupaten Bone. Data riset ini didapatkan dari Badan Pusat statistik Kabupaten Bone dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliitan ini adalah kuantitatif dengan menerapkan Analisis Regresi Linear Berganda. Temuan riset menghasilkan bahwa PDRB memiliki nilai koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten Bone, Pengeluaran pemerintah menghasilkan korelasi negatif serta signifikan terhadap pengangguran kabupaten Bone. Selain itu, Inflasi berslope negatif serta tidak signifikan terhadap pengangguran kabupaten Bone.

Kata kunci: Pengangguran, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi

ABSTRACT

Unemployment is a complex phenomenon that has an impact on the welfare of society and the economic development of a region. This study aims to determine the impact of Gross Regional Domestic Product, government consumption spending and inflation on the response in Bone Regency. The data for this study were obtained from the Central Bureau of Statistics for Bone Regency and the Regional Planning and Development Agency for South Sulawesi Province. The research method used in this research is quantitative by applying Multiple Linear Regression Analysis. The research findings show that GRDP has a negative coefficient and is not significant to the level of stimulation of Bone Regency. Government expenditure has a negative and significant relationship to the response of Bone Regency. Besides that, inflation has negative slope and is not significant to the responses of Bone district.

Keywords: *Unemployment, Gross Regional Domestic Product, Government Expenditure, Inflation*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat diukur dari segi aspek peningkatan pendapatan atau pendapatan per kapita saja. Akan tetapi dalam



evaluasi pembangunan ekonomi juga perlu mempertimbangkan dari segi distribusi pendapatan kepada penduduk serta mengidentifikasi pihak yang mendapatkan manfaat dari proses distribusi tersebut. Stabilitas pertumbuhan ekonomi belum dapat dianggap tercapai jika ketersediaan serta perluasan distribusi, termasuk barang-barang kebutuhan pokok mengalami penurunan setiap tahunnya, beban sosial semakin meningkat, ketidakmerataan distribusi pendapatan bertambah, taraf pengangguran meningkat, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin bertambah.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya akan mengakibatkan peningkatan penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya, yang pada gilirannya menciptakan masalah pengangguran. Dalam konteks ini, pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang cepat dan signifikan menyebabkan masalah pengangguran menjadi semakin serius, (Murapi dkk, 2021)

Pengangguran terjadi ketika seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Individu-individu ini sering memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan sesuai dengan preferensi mereka. Fenomena pengangguran tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memengaruhi sektor-sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Sementara tingkat pengangguran juga memiliki peran penting dalam performa perekonomian. Kaufman dan Hotchikss mengemukakan bahwa pengangguran bisa disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi. Ketersediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan. Penurunan tingkat pengangguran dianggap positif bagi perekonomian karena menandakan bahwa perusahaan-perusahaan berhasil menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dan penjualan mereka. Walaupun begitu, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk yang bekerja dapat meningkat secara bersamaan dalam periode yang sama, (Handayani HR, 2019)

Provinsi Sulawesi Selatan, hingga tahun 2022, memiliki populasi sebanyak 9,23 juta penduduk. Provinsi ini terus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dengan fokus utama pada sektor-sektor seperti pendidikan, pertanian, perikanan, pariwisata, pelayanan kesehatan gratis, dan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Sulawesi selatan telah mempertahankan predikatnya sebagai penyuplai beras nasional yang penting hingga saat ini. Dalam hal lapangan pekerjaan, sektor pertanian tetap menjadi penggerak utama yang menyerap banyak tenaga kerja. Meskipun begitu, angka pengangguran di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Bone, masih tetap tinggi setiap tahunnya.

Permasalahan pengangguran juga menjadi salah satu isu yang signifikan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bone setiap tahun.

PDRB yang dihitung berdasarkan kesejahteraan penduduk di berbagai sektor di tingkat wilayah, memerlukan partisipasi Pemerintah daerah sebagai entitas yang mewakili pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Hal ini melibatkan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat untuk memitigasi tingkat pengangguran dan mengatasi dampak buruk dari tingkat inflasi terhadap perekonomian. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan Tingkat Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah, dan Tingkat Inflasi di Kabupaten Bone.

Tabel 1. Tingkat pengangguran, produk domestik regional bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah dan inflasi Kabupaten Bone, tahun 2017-2022.

Tahun	Pengangguran (%)	PDRB (Rupiah)	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	Tingkat Inflasi (%)
2017	4.55	18.970.527,04	1.563.006,27	5.54
2018	2.82	20.660.069,29	1.734.627,62	4.69
2019	3.01	22.108.038,47	2.078.596,68	1.64
2020	3.20	22.053.740,20	2.025.636,08	1.89
2021	4.15	23.273.868,47	2.089.369,53	2.26
2022	2.27	24.491.730,00	1.983.151,00	0.60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Bone, 2023

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2017-2022, terlihat tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, salah satu penyebab utama peningkatan pengangguran di Kabupaten Bone adalah dampak dari pandemi COVID-19, di mana banyak pedagang harus menghentikan usaha mereka akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu, pengangguran juga melibatkan pekerja formal dengan keterampilan rendah dan upah rendah, yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan produktivitas pekerja rendah, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Tahun 2021 mencatat peningkatan jumlah penganggur sebanyak 15.930 orang, yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh dampak COVID-19 pada sektor perekonomian dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan pengangguran mencapai 4.670 orang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan pengangguran, yang disebabkan oleh peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau semakin banyaknya tenaga kerja yang berhasil terserap di berbagai jenis pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kelompok masyarakat mulai menerima pekerjaan dengan beragam jenis pekerjaan.

Berdasarkan informasi yang tertera di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2017 hingga 2022, yang mana beberapa sektor mengalami penurunan dan pergeseran struktural sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19. Akibatnya, terjadi penurunan sedikit dalam nilai PDRB bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator yang membentuk PDRB di Kabupaten Bone, yang dilihat dari segi lapangan usaha, menunjukkan dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami peningkatan sebesar RP 16,23 triliun pada tahun 2018. Di sisi lain, sektor dengan kontribusi terendah pada PDRB Kabupaten Bone adalah sektor pengadaan air dengan nilai RP 9,36 miliar pada tahun 2018, dan peningkatan hanya sekitar dua ratus juta setiap tahunnya. Pada tahun 2021, komposisi PDRB dari harga konstan dan harga berlaku menunjukkan sektor primer sebesar 49%, sektor sekunder sebesar 37,2%, dan sisanya berasal dari sektor tersier, yakni sebesar 13,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor primer memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian Kabupaten Bone. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Bone mengandalkan pertanian tanaman pangan sebagai aktivitas utama, dan struktur ekonominya bergantung pada sektor primer.

Kemudian, pada akhir tahun 2022, terjadi kenaikan signifikan dalam PDRB sebesar 24,49 triliun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa produksi dalam berbagai sektor usaha telah mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19. Dalam periode tahun 2017 hingga 2021, proporsi belanja pemerintah (Pengeluaran Pemerintah - PK-P) berada pada kisaran 9,12% hingga mencapai puncak tertinggi sebesar 10,70% pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan kembali menjadi 10,39% hingga akhir tahun 2021, dengan peningkatan belanja pemerintah sebesar 10,14%. Fenomena ini mengisyaratkan peranan pemerintah dalam pengeluaran anggaran tidak berdampak terlalu besar.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel 1.4 pada tahun 2017, tingkat kenaikan harga umum atau inflasi mengalami peringkat sebesar 5,54%, sementara target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar 5,77% telah melewati batas tersebut. Kemudian pada tahun 2018, tercatat bahwa tingkat inflasi menunjukkan penurunan sebesar 0,85% dari target RKPD yang ditetapkan sebesar 6,89%. Dalam rentang waktu 2019 hingga 2021, terdapat peningkatan secara berkesinambungan dalam tingkat inflasi setiap tahunnya, meskipun rata-rata dari target RKPD yang ditetapkan setiap tahun tidak searah dengan proyeksi yang dibuat. Pada tahun 2022, tercatat bahwa inflasi turun sebesar 0,60% dari pencapaian target kinerja sebesar 1,35% (sesuai dengan target yang ditetapkan).

Teori Kurva Philips menerangkan bahwa bila pemerintah memiliki niat untuk mereduksi tingkat pengangguran, hal tersebut bisa dicapai melalui peningkatan tingkat inflasi. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tingkat inflasi, dampaknya akan berimbas pada kenaikan tingkat pengangguran, (H.sanusi & Rosdiana Fungsi, 2016).

Meskipun pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dianggap otomatis akan meningkatkan martabat dan harkat warga negara. Menurut United Nations Development Program (UNDP), terdapat tiga indikator yang dianggap dapat mengukur pembangunan, yaitu harapan hidup yang panjang dan sehat, peningkatan dalam pengetahuan, serta akses yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu memiliki kemampuan inovasi untuk mengatasi berbagai fenomena yang muncul di masyarakat, termasuk tantangan seperti tingkat pengangguran dan inflasi, (Siregar, 2018)

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang diterapkan pada riset ini adalah penelitian kuantitatif, dalam menggunakan data time series, serta diurutkan berdasarkan variabel tertentu seiring berjalannya waktu. Lokasi riset ini dilakukan di Kantor Biro Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis dan sumber data memanfaatkan data sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak berinteraksi secara langsung dengan subjek riset atau sumber-sumber lain yang searah dengan riset, meliputi: PDRB, Pengeluaran pemerintah, dan inflasi. Metode pengumpulan data dalam riset ini menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang dihasilkan dalam riset ini akan menggunakan salah satu program pengelola data statistik, yaitu SPSS 23. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa model persamaan yang digunakan dalam riset ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana: Y adalah pengangguran, β_0 adalah konstanta, β_1 adalah koefisien regresi PDRB, $\ln X_1$ adalah Logaritma natural PDRB, β_2 koefisien regresi Pengeluaran pemerintah, $\ln X_2$ adalah logaritma natural Pengeluaran pemerintah, β_3 adalah koefisien regresi inflasi, X_3 adalah inflasi dan e adalah *error term*.

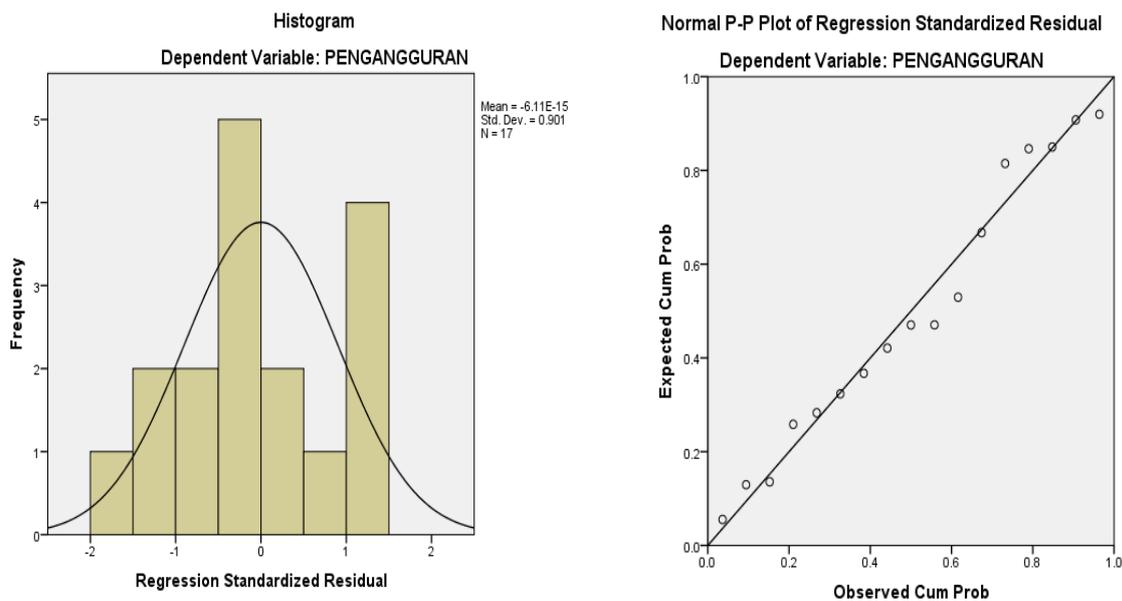
HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Normalitas

Pengujian bertujuan untuk menguji keberadaan distribusinormal pada variabel pengganggu atau residu dalam konteks model regresi. Model regresi yang dianggap baik adalah yang memiliki distribusi data yang bersifat normal atau mendekati keadaan normal, Ghazali dalam (Nabila, 2015). Dalam memastikan bahwa model regresi yang diterapkan pada riset ini memenuhi asumsi normalitas, metode pengambilan keputusan melibatkan pemanfaatan Grafik histogram dan Plot P-P. Jika bentuk blok histogram dan pola Plot P-P searah atau mendekati garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi

yang diterapkan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas (SC Simanjuntak, dkk, 2020) Setiap jenis pengujian ini memiliki kriteria tertentu dalam menjelaskan distribusi data dalam riset.

Berdasarkan gambar 1 di bawah ini, menunjukkan temuan penilaian uji normalitas yang menunjukkan bahwa grafiknya mengikuti atau mendekati kurva yang mengindikasikan data tersebut terdistribusi normal. Selain itu, data tersebut memiliki variasi yang tidak terlalu besar dan dapat dikategorikan sebagai baik. Bukti tambahan adalah nilai mean yang lebih tinggi dari standar deviasi ($0,901 < 6,11$).



Gambar 1. Uji Normalitas histogram dan uji normal p-plot

Sumber: Output SPSS 23, Tahun 2023

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
PDRB	0.231	4.327
Pengeluaran Pemerintah	0.244	4.101
Inflasi	0.532	1.878

Sumber: Output SPSS 23, Tahun 2023

Melalui Tabel 2 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki hasil dalam uji multikolinearitas sebagai berikut:

- 1) PDRB mempunyai nilai tolerance sebesar $0.231 > 0,01$ dan nilai VIF sebesar $4.327 < 10$, sehingga dapat diartikan variabel ini bebas dari multikolinearitas.

- 2) Pengeluaran pemerintah mempunyai nilai tolerance sebesar $0.244 > 0.01$ dan nilai VIF sebesar $4.101 < 10$, sehingga dapat diartikan variabel ini bebas dari multikolinearitas.
- 3) Inflasi mempunyai nilai tolerance $0.532 > 0.01$ dan nilai VIF sebesar $1.878 < 10$.

c. Uji Autokorelasi

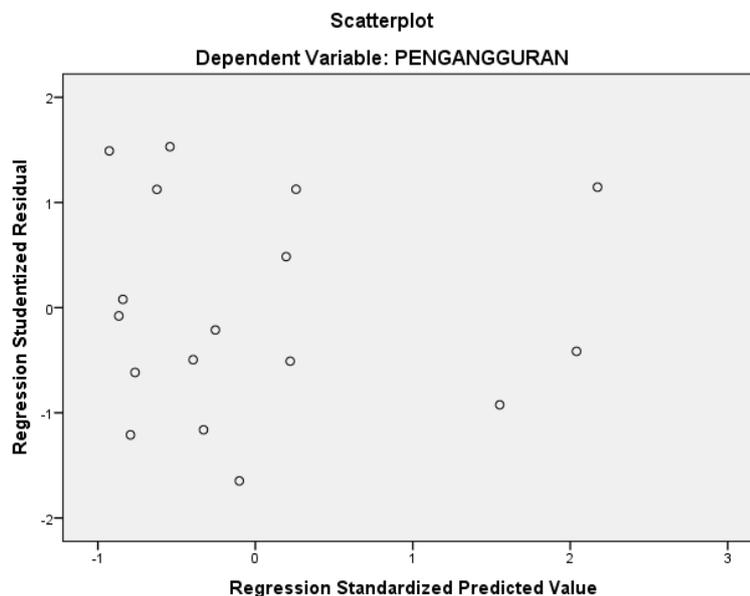
Tabel 3. Uji autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.06466
Cases < Test Value	8
Cases \geq Test Value	9
Total Cases	17
Number of Runs	10
Z	0.015
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.988

Sumber: Output SPSS 23 diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat ditafsirkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai signifikan (*asym sig*) berada di atas 0,05.

d. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 23, Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik *scatterplot* menyebar secara acak tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y,

artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode yang digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif atau negatif dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk memproyeksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan nilai variabel independen. Dalam riset ini digunakan model regresi linear berganda tiga variabel bebas yaitu PDRB, Pengeluaran pemerintah dan Inflasi untuk menguji pengaruh satu variabel terikat yaitu pengangguran di Kabupaten Bone. Berdasarkan temuan analisis, riset ini melibatkan periode pengamatan selama 17 tahun, mulai dari tahun 2006 hingga 2022.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Determinasi R Square

Tabel 4 Uji determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.950	0.902	0.880

Sumber: Output SPSS 23, Tahun 2023

Mengacu pada Tabel 4 nilai R Squared berada pada angka 0.950 sehingga dapat ditafsirkan bahwa variabel independenyaitu variabel PDRB (X1), pengeluaran pemerintah (X2) dan inflasi (X3) berimplikasi terhadap variabel dependen yaitu variabel tingkat pengangguran terbuka (Y) dengan persentase pengaruhnya sebesar 90.2%. Sisanya sebesar 8% tidak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam riset ini.

b. Uji Simultan F

Melalui tabel 4.8 dapat dilihat temuan uji signifikan simultan (uji statistik F), diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 artinya variabel independen secarasimultan berimplikasi terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	90.707	3	30.236	40.071	.000 ^b
Residual	9.809	13	.755		
Total	100.516	16			

Sumber: Output SPSS 23, Tahun 2023

c. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Uji parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	69.843	7.408		9.428	.000
PDRB	-1.218	.538	-.408	-2.265	.041
PENGELUARAN PEMERINTAH	-3.158	.789	-.703	-4.005	.001
INFLASI	-.134	.079	-.203	-1.706	.112

Sumber: Output SPSS 23 diolah 2023

Melalui Tabel 6 PDRB (X1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-1.218 > 1,771$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 dalam artian nilainya lebih rendah dari α ($0,041 < 0,05$) dan koefisien bertanda negatif yang berarti bahwa secara parsial PDRB (X1) berkorelasi negatif dan berimplikasi secara signifikan terhadap pengangguran (Y) di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa selama periode tersebut, PDRB menunjukkan interaksi yang cenderung negatif dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone dan interaksinya signifikan secara statistik.

Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah (X2) memiliki nilai koefisien sebesar -3.158 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-4.005 < 1,771$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,19 atau condong kecil dari α ($0,00 < 0,05$). Menandakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan serta menunjukkan koefisien bertanda negatif terhadap pengangguran di Kabupaten Bone.

Variabel inflasi (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0.134 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1.706 < 1,771$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,112 atau lebih besar dari α ($0,11 > 0,05$) Menandakan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh tidak signifikan serta menunjukkan koefisien bertanda negatif terhadap pengangguran di Kabupaten Bone.

1. Pengaruh PDRB terhadap pengangguran.

Berdasarkan temuan riset diperoleh bahwa PDRB (X1) berimplikasi secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran (Y), pada temuan analisis regresi linier berganda, didapatkan bahwa koefisien regresi untuk variabel PDRB (X1) adalah sebesar 1.218. Ini mengindikasikan bahwa ketika nilai variabel lainnya tetap stabil, setiap peningkatan sebesar 1 persen dalam PDRB akan menyebabkan pengurangan sebesar 1.218 persen dalam tingkat pengangguran (Y). kondisi ini mengindikasikan jika nilai koefisien regresi untuk hubungan antara PDRB dan pengangguran adalah negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai PDRB, semakin rendah tingkat pengangguran. Dapat ditafsirkan bahwa riset ini sesuai dengan hipotesis.

Keterkaitan antara PDRB dan tingkat pengangguran dapat diterangkan melalui prinsip Okun (Okun's law), yang berasal dari Arthur Okun, seorang ahli ekonomi yang merintis risetnya. Konsep ini mengungkapkan interaksi empiris antara pengangguran dan temuan produksi dalam siklus ekonomi. Studi empiris yang ia jalankan menunjukkan bahwa tiap peningkatan sebesar 1 poin dalam tingkat pengangguran akan menyebabkan penurunan sebesar 2 persen dalam Produk Domestik Bruto (GDP). Artinya, ada dampak yang merugikan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, sekaligus juga dampak yang berlawanan, yaitu pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Fakta bahwa penurunan angka pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan, yang pada gilirannya menciptakan akibat dalam distribusi (Dornbusch, 1992)

Menurut Kydland & Prescott (1990) menyajikan pandangan bahwa ekonomi mengalami fluktuasi alamiah dari periode pertumbuhan yang cepat menjadi periode kontraksi. Saat PDRB meningkat, ini cenderung menghasilkan ekspansi ekonomi di mana perusahaan meningkatkan produksi dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, dalam fase kontraksi ekonomi, perusahaan mungkin harus memangkas produksi dan mengurangi tenaga kerja. Fluktuasi ini dapat secara langsung mempengaruhi tingkat pengangguran.

Temuan riset ini searah dengan temuan riset yang dilakukan oleh Ali Tutupoho (2019), bahwa antara PDRB dengan pengangguran terdapat pengaruh negatif dan signifikan. Riset ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Albab Al Umar dkk, (2020) bahwa antara PDRB dan pengangguran memiliki interaksi negatif dan signifikan. Kondisi tersebut didasari oleh teori hukum Okun yang menyatakan bahwa ada interaksi negatif antara PDRB dan pengangguran, hukum Okun dapat membantu dalam menggambarkan keadaan ekonomi di suatu wilayah. Taraf pengangguran yang rendah dalam situasi ini menunjukkan stabilitas ekonomi, sedangkan taraf pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakstabilan ekonomi di suatu wilayah. Dengan bertambahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), akan tercipta lebih banyak peluang kerja yang mampu memperkecil banyaknya pengangguran.

Temuan riset ini juga searah dengan riset yang dilakukan oleh Sembiring & Sasongko (2019), Koefisien yang ditemukan untuk pengaruh PDRB terhadap pengangguran adalah -0.715768 dan mempunyai angka signifikansi sebesar 1 persen. Artinya, setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran sekitar 0,72 persen. Oleh karena itu, hal ini akan meminimalisir kemungkinan melonjaknya angka pengangguran. Temuan ini sejalan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu mengtemuikan barang dan jasa, memnuhi kebutuhan manusia serta memperluas lapangan usaha hingga meningkatkan keuntungan. Sehingga perluasan lapangan usaha akan memicu kenaikan output yang positif dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga keadaan tersebut akan memperkecil risiko pengangguran.

Riset ini berlawanan dengan temuan riset Poyoh dkk (2017), bahwa PDRB berimplikasi secara positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Menurutnya, ketika terjadi pertumbuhan pada laju PDRB di Provinsi Sulawesi Utara maka hal tersebut akan dibarengi dengan meningkatnya pengangguran. Riset ini searah dengan riset yang dilakukan oleh Zahroh (2017) bahwa PDRB terhadap pengangguran berimplikasi secara positif dan tidak signifikan. Artinya, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menghasilkan peningkatan taraf pengangguran. Kondisi ini searah dengan teori yang dikemukakan oleh Boserup (1999), yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk memicu penggunaan sistem pertanian yang lebih intensif dalam suatu masyarakat, serta meningkatnya produksi dalam sektor agraria. Boserup juga menyatakan bahwa peningkatan produksi dalam sektor agraria mendorong pengadopsian teknologi pertanian yang lebih canggih dan modern. Pada pandangannya, inovasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas pekerja, terutama ketika jumlah tenaga kerja tersedia dalam jumlah yang besar. Karna itu, pertumbuhan penduduk sebenarnya mendorong penggunaan inovasi atau teknologi baru.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan temuan riset diperoleh bahwa Pengeluaran pemerintah (X₂) telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran (Y) berdasar pada temuan analisis regresi linier berganda. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel PDRB (X₂) adalah -3.158. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan satu persen dalam pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan penurunan sebesar 3.158 persen dalam tingkat pengangguran.

Temuan dari riset ini searah dengan pandangan yang diajukan oleh Keynes, yang menyatakan bahwa dalam sistem pasar bebas, pencapaian penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, upaya dan tindakan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan tenaga kerja penuh serta pertumbuhan ekonomi yang stabil (Sukirno, 2006). Dengan cara intervensi yang dapat diimplementasikan adalah melalui regulasi fiskal. Dalam kondisi tersebut, Keynes mengindikasikan adanya perlunya regulasi fiskal yang bersifat menyeluruh dengan menambah pengeluaran pemerintah (government expenditure)

Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat berdampak negatif pada sektor swasta. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, misalnya melalui program infrastruktur atau proyek sosial, ini dapat mengakibatkan lonjakan permintaan di pasar. Namun, lonjakan ini dapat menyebabkan peningkatan suku bunga, karena pemerintah harus meminjam uang untuk mendanai pengeluarannya. Naiknya suku bunga dapat mengurangi investasi dan pengeluaran swasta, karena perusahaan dan individu harus membayar lebih banyak untuk meminjam. Akibatnya, pengurangan investasi dan konsumsi

swasta dapat mempengaruhi negatif pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan tingkat pengangguran meningkat (Romer, 1994).

Riset ini didukung oleh riset Jirang dkk, (2014) bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dan merugikan terhadap tingkat pengangguran. Temuan pada riset ini juga mendukung konsep yang diajukan oleh Keynes, yaitu bahwa dalam konteks pasar bebas, penciptaan lapangan kerja penuh tidak selalu terjadi secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan kebijakan pemerintah untuk mencapai pemanfaatan tenaga kerja yang maksimal dan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pemikiran ekonomi aliran Keynesian menyatakan bahwa bentuk negatif terjadi antara pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran, menurutnya variabel pemerintah yang dalam hal ini (khususnya anggaran) dianggap sebagai salah satu faktor penggerak pembangunan ekonomi yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan terciptanya *multiplier effect* pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor ekonomi, bahwa semakin besar peningkatan *multiplier effect* diasumsikan bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif dan merata dapat terpenuhi.

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Lewat temuan olah data pada riset ini diperoleh variabel inflasi (X_3) berimplikasi secara negative serta tidak menunjukkan signifikansi dengan tingkat pengangguran (Y), dalam temuan analisis regresi linier berganda, didapati bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel PDRB (X_3) adalah -0.134. Ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi senilai 1%, maka tingkat pengangguran di Kabupaten Bone akan juga menghadapi penurunan senilai 0.13%. Temuan tersebut searah dengan prinsip yang pernah diungkapkan oleh AW Philips di tahun 1958 dalam teori Hukum Philips. Philips menerangkan terdapat korelasi negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yang berarti bahwa jika salah satu variabel naik, variabel lainnya akan turun. Namun pada kenyataannya kenaikan inflasi tidak dapat menciptakan kesempatan kerja secara merata sehingga tidak berdampak signifikan dalam menekan tingkat pengangguran. Dari pengujian ini dapat ditafsirkan bahwa riset ini sesuai hipotesis.

Teori Phillips menyatakan bahwa terdapat interaksi negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Menurut teori ini, saat inflasi meningkat, daya beli uang menurun sehingga upah riil (yang disesuaikan dengan inflasi) cenderung turun. Akibatnya, perusahaan cenderung mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja karena biaya tenaga kerja relatif lebih rendah. Ini dapat menghasilkan penurunan sementara dalam tingkat pengangguran saat inflasi meningkat (Phillips, 1958).

Inflasi menjadi salah satu petunjuk memburuknya situasi ekonomi suatu negara, dan dalam riset ini, fokus diberikan pada Kabupaten Bone. Tingkat inflasi yang naik dapat mendorong bank sentral untuk meningkatkan suku bunga, yang berpotensi mengakibatkan kontraksi ekonomi atau pertumbuhan yang negatif

dalam sektor riil. Efek yang lebih luas dari kondisi ini adalah peningkatan jumlah pengangguran, mengakibatkan inflasi dan tingkat pengangguran menjadi alat ukur untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara, baik dalam aspek positif maupun negatif.

Riset ini searah dengan temuan riset Saptanno & Maatoke, (2022) bahwa variabel inflasi berimplikasi secara negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Riset berjalan searah dengan riset Fikri & Anis, (2023), jika permintaan agregat meningkat, sesuai dengan prinsip teori permintaan, maka harga juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan harga yang terkait dengan inflasi mendorong produsen untuk meningkatkan volume produksinya guna memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Ini berakibat pada peningkatan jumlah tenaga kerja secara tidak langsung, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

Riset ini berlawanan dengan temuan riset Ayuningtyas (2019) bahwa inflasi berimplikasi secara positif serta menunjukkan signifikansi dengan pengangguran, riset ini menyatakan bahwa setiap penambahan inflasi akan berimplikasi dengan peningkatan tingkat pengangguran sebesar koefisien nilai inflasi. Kondisi tersebut searah dengan riset Purbadkk (2022) bahwa variabel inflasi berimplikasi secara positif dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Utara. Kondisi tersebut membuktikan bahwa *Trade off* antara inflasi serta angka pengangguran, yakni jika taraf pengangguran meningkat, maka inflasi menunjukkan laju yang tinggi.

KESIMPULAN

PDRB berimplikasi secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone tahun 2006-2022. Artinya setiap peningkatan PDRB mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pengangguran di Kabupaten Bone. Pengeluaran pemerintah berimplikasi secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone tahun 2006-2022. Artinya setiap peningkatan pengeluaran pemerintah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pengangguran di Kabupaten Bone. Inflasi berimplikasi secara negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Bone tahun 2006-2022. Artinya setiap peningkatan inflasi tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pengangguran di Kabupaten Bone. PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Bone, ini mengindikasikan bahwa variabel PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi memiliki peranan yang penting dalam mengurangi pengangguran

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Albab Al Umar, A. U., Lorenza, L., Nur Savitri, A. S., Widayanti, H., & Lutfi Mustofa, M. T. (2020). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat

- Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(1), 1-12.
- (2) Ascarya. (2017). The real determinants of financial crisis and how to resolve it in Islamic economics perspective. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 501-531.
 - (3) Dornbusch, Rudiger. Stanley Fischer." Makro Ekonomi", Jakarta, Erlangga,1992
 - (4) Fikri, I., & Anis, A. (2023). Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 37.
 - (5) H.sanusi, & Rosdiana Fungsi. (2016). Faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kabupaten bone. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 85.
 - (6) Handayani HR, P. D. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 4.
 - (7) Jirang, P. A., Musa, H. A. H., Wijaya, H. A., & Si, M. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Economics*, 1-13.
 - (8) Kurniawan, R. C. (2013). Analisis Pengaruh PDRB , UMK , dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*, 1(1), 1-24.
 - (9) Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1990). Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 14(2), 3-18.
 - (10) Murapi, I., Astarini, D. A. O., & Subudiartha, I. N. (2021). Tingkat Pengangguran Akibat Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Tingkat Pengangguran Akibat Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 2(1), 21-22.
 - (11) Nabila, H. A. (2015). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2), 8.
 - (12) Phillips, A. W. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. *Economica*, 25(100), 283-299.

- (13) Romer, P. (1994). The origins of endogenous growth. *A Macroeconomics Reader*, 8(1), 3–22. <https://doi.org/10.4324/9780203443965.ch26>
- (14) Saptanno, F., & Maatoke, C. K. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 16(1), 41–49.
- (15) SC Simanjuntak, M Panjaitan, dan J. N. (2020). *Pengaruh Bauran Promosi Dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada PT.TELKOM Kota Medan*. 21(1), 1–9.
- (16) Silaban, P. S. M. J., Sembiring, I. P. S. B., & Sitepu, V. A. B. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(2), 128. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v11i2.1077>
- (17) Siregar, A. (2018). *Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat pengangguran Terbuka Pada 4 Kota Di Provinsi Sumatera Utara 1994-2018*. T.